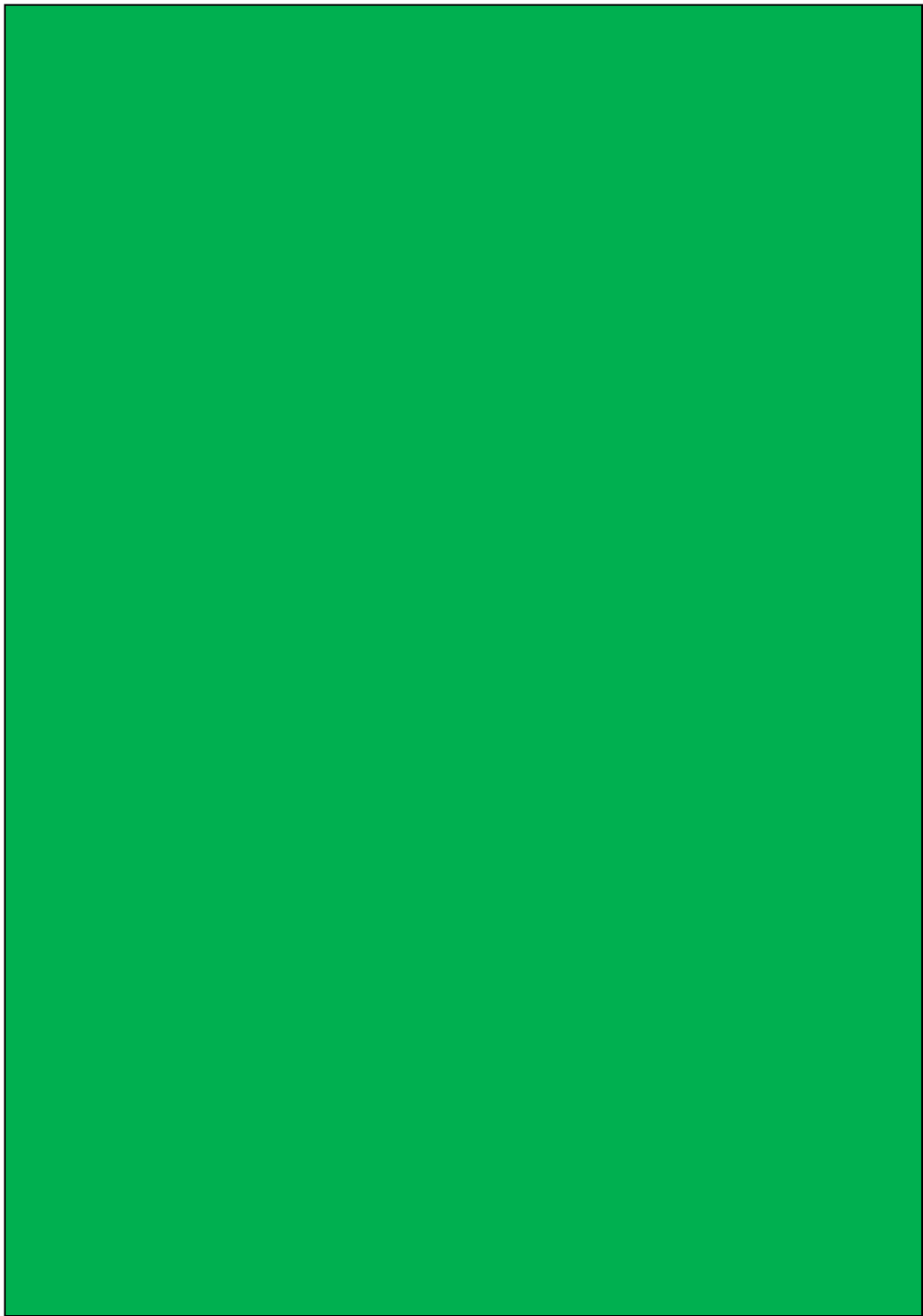


PT.PSP.A.3-1.2013

PEDOMAN TEKNIS PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN TA. 2013



DIREKTORAT PERLUASAN DAN PENGELOLAAN LAHAN
DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
JAKARTA, 2013



KATA PENGANTAR

Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan dimaksudkan sebagai acuan dan panduan bagi para petugas Dinas lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan) baik Propinsi, Kabupaten/kota maupun petugas lapangan dalam melaksanakan kegiatan **Optimasi Lahan** yang dananya bersumber dari dana APBN TA. 2013.

Para petugas terkait diharapkan dapat mempelajari dan mencermati pedoman ini dengan seksama, dengan memahami Pedoman Teknis ini, diharapkan tidak akan terjadi keragu-raguan dalam implementasi kegiatan dilapangan serta kendala /hambatan yang ada akan dapat diatasi sehingga kinerja yang diperoleh dapat tercapai secara optimal .

Muatan pedoman teknis ini bersifat umum karena berlaku secara nasional, sehingga perlu dijabarkan dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan oleh Dinas lingkup Pertanian Propinsi dan Petunjuk Teknis oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota secara lebih rinci sesuai dengan kondisi spesifik daerah masing-masing.

Untuk meningkatkan pemahaman petugas terhadap pedoman teknis ini, sangat diharapkan dalam berbagai kesempatan yang ada (misalnya Acara Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Rapat Teknis, Supervisi dsbnya) Pedoman Teknis ini dapat didiskusikan bersama secara intensif. Dengan demikian diharapkan semua pihak terkait di Pusat

dan Daerah dapat memiliki kesamaan pandangan, gerak dan langkah dalam melaksanakan kegiatan ini.

Akhirnya, sangat diharapkan komitmen berbagai pihak untuk dapat melaksanakan kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan dengan sebaik-baiknya dalam bingkai waktu yang telah ditentukan, agar hasil pembangunan melalui kegiatan ini benar-benar dapat dinikmati manfaatnya bagi sebesar-besarnya kesejahteraan petani di Indonesia.

Jakarta, Januari 2013

**Direktur
Perluasan dan Pengelolaan Lahan,**

**Ir.Tunggul Imam Panudju, Msc
NIP.195805261987031002**

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	v
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan	2
C. Sasaran	3
D. Pengertian	4
II. RUANG LINGKUP KEGIATAN	8
A. PERSIAPAN	8
B. PELAKSANAAN	8-9
III. SPESIFIKASI TEKNIS	10
A. Norma	10
B. Standar Teknis	10
C. Kriteria	11
IV. PELAKSANAAN KEGIATAN	12
A. Cara Pelaksanaan	12
B. Tahapan Pelaksanaan	12
C. Jadwal Kegiatan	20
D. Pendanaan	20

V.	PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN	23
A.	Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi	23
B.	Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kab./Kota	24
C.	Format Laporan	25
D.	Alur Laporan	26
VI.	INDIKATOR KINERJA OPTIMASI LAHAN	28
A.	Indikator Keluaran (Outputs)	28
B.	Indikator Hasil (Outcomes)	28
C.	Indikator Manfaat (Benefits)	29
D.	Indikator Dampak (Impacts)	29
VII.	PENUTUP	30

DAFTAR LAMPIRAN

	<i>Halaman</i>
1. Lampiran 1. Sasaran Lokasi Pengembangan Optimasi Lahan Tahun 2013	31
2. Lampiran 2. Contoh RUKK Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan TA.2013	39
3. Lampiran 3. Contoh Jadwal Kegiatan Optimasi Lahan Tahun 2013	40
4. Lampiran 4. Contoh Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen. PSP TA. 2013 (form PSP.01)	41
5. Lampiran 5. Contoh Format Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Ditjen. PSP TA. 2013 (form PSP.02)	42
6. Lampiran 6. Contoh Format Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen PSP TA. 2013 (form PSP.03)	43
7. Lampiran 6 (lanjutan). Contoh Format Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen. PSP TA. 2013 (form PSP.03)	44
8. Lampiran 7. Skor Pembobotan Fisik Kegiatan Optimasi Lahan TA. 2013	45

9.	Lampiran 8. Rekapitulasi Laporan Manfaat Kegiatan Ditjen PSP.....	46
10.	Lampiran 9. . Contoh Outline Laporan Akhir Kegiatan Optimasi Lahan TA. 2013...	47
11.	Lampiran 10. Tabel Daftar Resiko.....	48
12.	Lampiran 11. Tabel Daftar Penanganan Resiko....	49

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lahan pertanian adalah salah satu faktor produksi yang sangat penting, karena lahan merupakan media tumbuh bagi tanaman. Banyak lahan-lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan, apabila ditangani maka lahan dimaksud dapat menghasilkan produksi yang optimal.

Optimasi lahan pertanian merupakan usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan pertanian menjadi lahan usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan melalui upaya perbaikan dan peningkatan daya dukung lahan, sehingga dapat menjadi lahan usahatani yang lebih produktif. Kegiatan optimasi lahan pertanian diarahkan untuk memenuhi kriteria lahan usahatani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan perternakan dari aspek teknis, perbaikan fisik dan kimiawi tanah, serta peningkatan infrastruktur usahatani yang diperlukan.

Kegiatan optimasi lahan diarahkan untuk menunjang terwujudnya ketahanan pangan danantisipasi kerawanan pangan. Khususnya Kegiatan Optimasi Lahan Tanaman Pangan diarahkan untuk mendukung surplus 10 juta ton beras pada tahun 2014, sehingga komoditasnya harus padi, bukan komoditas lain.

Untuk meningkatkan pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan dan lahan yang indeks pertanamannya (IP) masih rendah, maka pada TA. 2013 dilaksanakan kegiatan pengembangan optimasi lahan, sebagai upaya perluasan areal tanam bagi komoditi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

B. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan adalah:

- a. Memanfaatkan lahan yang sementara tidak diusahakan menjadi lahan pertanian produktif
- b. meningkatkan indeks pertanaman (IP) untuk memperluas areal tanam.
- c. Mendukung Program Peningkatan Beras Nasional (P2BN)
- d. Melestarikan sumber daya lahan pertanian
- e. Memperluas kesempatan kerja dan kesempatan berusaha di pedesaan.

C. Sasaran

Sasaran kegiatan optimasi lahan diarahkan untuk :

1. Mendukung Subsektor Tanaman Pangan, komoditasnya harus padi, pada lahan – lahan yang sementara tidak diusahakan dan diprioritaskan pada (IP) < 100.
2. Mendukung Subsektor Hortikultura
Lahan kawasan komoditi hortikultura yang belum optimal (komoditas buah-buahan dan atau sayuran).
3. Mendukung Subsektor Perkebunan
Optimasi lahan perkebunan diarahkan pada lahan kawasan perkebunan rakyat yang produktivitasnya rendah, jumlah populasi tanaman rendah.
4. Kawasan Peternakan
Optimasi lahan peternakan diarahkan pada lahan HMT yang sementara tidak diusahakan.
5. Sasaran kegiatan optimasi lahan tahun 2013 adalah seluas 253.300 ha, yang terdiri dari kawasan tanaman pangan 227.620 ha, hortikultura 5.880 ha, perkebunan 19.640 ha dan peternakan 160 ha yang

tersebar di 32 Propinsi pada 442 Kabupaten/Kota. Secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1.

D. Pengertian

Dalam pelaksanaan optimasi lahan pertanian terdapat pengertian-pengertian / istilah, sebagai berikut :

1. **Optimasi Lahan Pertanian** adalah usaha meningkatkan pemanfaatan sumber daya lahan yang sementara tidak diusahakan atau IP rendah menjadi lahan usahatani yang lebih produktif, melalui perbaikan fisik dan kimiawi tanah serta bantuan sarana dan prasarana lainnya dalam menunjang peningkatan areal tanam dan atau indeks pertanaman (IP).

Bilamana dilaksanakan pada lahan kering berlereng, maka dapat diterapkan kaidah konservasi untuk mencegah erosi dan penurunan provitas lahan. Khusus pada daerah rawa dan bekas tambang dapat diterapkan teknologi reklamasi untuk mengoptimalkan profitas lahan.

Pelaksanaan fisik meliputi pembersihan lahan dan pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam,

perbaikan kesuburan lahan, perbaikan sarana dan prasarana serta pemeliharaan.

2. **Lahan Pertanian sementara tidak diusahakan** adalah lahan pertanian yang tidak diusahakan disebabkan oleh faktor pembatas daya dukung lahan dan kelengkapan / kondisi infrastruktur pertanian, sehingga kondisinya ditumbuhi alang-alang dan semak belukar.
3. **Lahan pertanian dengan gap Indeks Pertanaman (IP)** adalah lahan pertanian yang belum diusahakan secara optimal dan berpotensi untuk ditingkatkan indeks pertanamannya.
4. **Sawah Beririgasi Teknis** adalah sawah yang memperoleh pengairan dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang agar penyediaan dan pembagian air irigasi dapat sepenuhnya diatur dan diukur dengan mudah. Jaringan irigasi seperti ini biasanya terdiri dari saluran primer, sekunder dan tersier. Saluran induk, sekunder dan bangunannya dibangun, dikuasai dan dipelihara oleh pemerintah.

5. **Sawah Beririgasi Setengah Teknis** adalah sawah berpengairan teknis akan tetapi pemerintah hanya menguasai bangunan penyadap untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan jaringan selanjutnya tidak diukur dan tidak dikuasai pemerintah.
6. **Sawah Berpengairan Sederhana** adalah sawah yang memperoleh pengairan dimana cara pembagian dan pembuangan airnya belum diatur, walaupun pemerintah sudah ikut membangun sebagian dari jaringan tersebut (misalnya biaya membuat bendungannya).
7. **Sawah Beririgasi Desa** adalah sawah yang memperoleh pengairan dari jaringan irigasi desa (JIDES) yaitu jaringan irigasi berskala kecil yang terdiri dari bangunan penangkap air (bendung, bangunan pengambilan), saluran dan bangunan pelengkap lainnya. JIDES dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa baik dengan atau tanpa bantuan pemerintah.
8. **Lahan Tadah Hujan/Lahan Kering** adalah lahan usaha tani yang sumber air utamanya berasal dari air curah hujan.

9. **Lahan Rawa** adalah lahan usaha tani yang sumber air utamanya berasal dari air rawa.

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

Ruang lingkup kegiatan pengembangan optimasi lahan pertanian berupa :

A. Persiapan

1. Pembuatan petunjuk pelaksanaan
2. Pembuatan petunjuk teknis
3. Koordinasi dengan instansi terkait
4. Sosialisasi kegiatan
5. Inventarisasi calon petani dan calon lokasi (CPCL).
6. Penetapan lokasi dan petani pelaksana
7. Musyawarah kelompok tani (Rembug Desa)
8. Pembuatan rekening kelompok
9. Pembuatan rancangan teknis sederhana
10. Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
11. Transfer dana

B. Pelaksanaan

1. Pelaksanaan fisik ;
 - a. Persiapan lahan dan Pengolahan tanah
 - b. Penyediaan sarana produksi
 - c. Penanaman
 - d. Pemeliharaan
 - e. Panen

2. Monitoring
3. Evaluasi
4. Pelaporan

III. SPESIFIKASI TEKNIS

Spesifikasi teknis kegiatan pengembangan optimasi lahan meliputi norma, standar teknis dan kriteria sebagai berikut :

A. Norma

Optimasi lahan diarahkan untuk perluasan areal tanam melalui pemanfaatan lahan yang sementara tidak diusahakan dan peningkatan indeks pertanaman (IP) pada lahan kawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.

B. Standar Teknis

1. Luas hamparan untuk padi ≥ 20 ha, sedangkan untuk komoditas hortikultura, perkebunan, dan peternakan luas hamparannya ≥ 5 ha
2. Komoditas yang dikembangkan sesuai dengan subsektor satker pelaksana. Khusus untuk sub sektor tanaman pangan, komoditas yang dikembangkan adalah padi dan sub sektor peternakan yang dikembangkan adalah hijauan makanan ternak (HMT)

C. Kriteria

Kriteria lokasi pelaksanaan kegiatan optimasi lahan sebagai berikut :

1. Optimasi lahan dilaksanakan pada lahan kawasan pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan) yang sementara tidak diusahakan atau lahan pertanian yang belum diusahakan secara optimal yang berpotensi untuk ditingkatkan indeks pertanamannya.
2. Status lahan jelas dan tidak dalam sengketa.
3. Petani sasaran adalah petani pemilik penggarap atau penggarap, yang bersedia secara berkelompok mengikuti kegiatan dan melakukan pemeliharaan selanjutnya.
4. Ada potensi sumber air baik sumber air permukaan, air tanah maupun air hujan dalam jumlah yang cukup.
5. Luas lahan pemilik penggarap atau penggarap maksimum 2 ha/KK.

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

A. Cara Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan penyiapan lahan dilakukan sebesar-besarnya melibatkan **partisipasi** masyarakat / petani setempat. Dengan mekanisme ini diharapkan dapat ditumbuhkan semangat kebersamaan, rasa memiliki dalam melestarikan / memelihara hasil kegiatan. Semua komponen kegiatan optimasi lahan direncanakan dan dilaksanakan sepenuhnya oleh kelompok tani melalui mekanisme musyawarah kelompok tani (Rembug Desa).

B. Tahapan Pelaksanaan

1. Persiapan

a. Pembuatan petunjuk pelaksanaan

Pembuatan petunjuk pelaksanaan dilakukan oleh dinas propinsi sebagai penjabaran dari pedoman teknis yang dibuat oleh pusat sesuai dengan kondisi daerah.

b. Pembuatan petunjuk teknis

Pembuatan petunjuk teknis dilakukan oleh dinas Kab./Kota sebagai penjabaran dari petunjuk

pelaksanaan yang dibuat oleh propinsi sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

c. Koordinasi

Koordinasi dilakukan dengan instansi terkait di kabupaten/kota termasuk dengan aparat desa dan masyarakat luas, untuk memperoleh dukungan dan kemudahan dalam pelaksanaan kegiatan.

d. Sosialisasi

Sosialisasi bertujuan agar masyarakat mengetahui dengan jelas tentang rencana kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga masyarakat bersedia berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

e. Inventarisasi Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL)

Inventarisasi calon petani dan calon lokasi (CPCL) dilakukan oleh petugas Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota (Tim Teknis) berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperoleh calon lokasi dan calon petani pelaksana kegiatan optimasi lahan.

Inventarisasi calon lokasi meliputi faktor-faktor pembatas / kritis yang menyebabkan lahan sementara tidak diusahakan dan IP rendah antara lain : modal, tenaga kerja, prasarana, lahan absentee dll. Diharapkan pada tahun yang akan datang CPCL sudah dilakukan pada tahun sebelumnya dan dimasukkan dalam proposal.

f. Penetapan Lokasi dan Petani Pelaksana

Penetapan lokasi dan petani pelaksana berdasarkan hasil inventarisasi CPCL yang memenuhi standar teknis dan kriteria, yaitu dipilih calon lokasi yang paling ringan faktor pembatasnya. Selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/ Kota.

g. Musyawarah Kelompok Tani (Rembug Desa)

Musyawarah kelompok tani (rembug desa) dimaksudkan untuk menyusun perencanaan secara partisipatif sesuai aspirasi masyarakat, sehingga diharapkan mereka akan merasa memiliki dan bersedia memelihara kelanjutannya.

Dalam musyawarah kelompok tani (Rembug Desa), petugas bertindak sebagai fasilitator. Hasil dari musyawarah kelompok tani menjadi bahan dalam penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK).

h. Pembuatan Rekening Kelompok

Rekening kelompok diperlukan untuk menerima transfer dana dalam rangka bantuan sosial ini dari dana Tugas Pembantuan. Rekening kelompok yang dimaksud merupakan rekening bersama antara ketua kelompok dengan Kepala Dinas kabupaten/kota, dalam bentuk rekening tabungan pada Bank Pemerintah terdekat.

i. Rancangan Teknis Sederhana (RTS)

Rancangan Teknis Sederhana digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan fisik di lapangan dan dibuat dengan memperhatikan kondisi lapangan, kebutuhan lapangan, kecukupan dana, kesediaan bahan-bahan setempat berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani. Rancangan

Teknis sederhana dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota.

Hasil rancangan teknis sederhana terdiri dari :

- 1). Sket lokasi yang menggambarkan keberadaan calon lokasi optimasi lahan dan digambar pada peta administratif desa.
- 2). Rancangan teknis sederhana dapat dibuat dalam bentuk gambar tanpa skala (sket), terdiri dari :
 - a). Gambar rancangan yang memuat ;
 - Batas lokasi optimasi lahan dan batas kepemilikan lahan masing-masing petani peserta.
 - Lokasi bidang olah, calon pembangunan infrastruktur pertanian (jalan usahatani, perbaikan saluran, dll).
 - b). Rancangan teknis sederhana yang lebih detail berikut ukuran / dimensi di gambar jelas tersendiri.
 - c). Lay out (tata letak) lubang pertanaman (tanaman perkebunan dan hortikultura tahunan sesuai

rencana komoditi yang dikembangkan).

- 3). Jenis pekerjaan yang akan dilakukan dan rencana anggaran biaya (RAB).
- 4). Daftar definitif petani dan luas pemilikan lahan.

j. Penyusunan RUKK

Penyusunan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), berdasarkan hasil musyawarah kelompok tani dan hasil Rancangan Teknis sederhana, dilaksanakan secara bersama-sama antara petani dan petugas untuk menentukan kegiatan definitif yang akan dilaksanakan.

Dalam penyusunan RUKK apabila terdapat penggunaan dana dari APBD atau swadaya petani supaya dicantumkan. Contoh RUKK seperti pada lampiran 2.

k. Transfer dana

Mekanisme transfer dana mengacu pada pedoman pengelolaan dana bantuan sosial yang dikeluarkan oleh Ditjen. PSP.

2. Pelaksanaan/Konstruksi

a. Pelaksanaan Fisik

- 1) Pembersihan lahan, dilakukan dengan cara menebang dan mengumpulkan potongan pohon atau semak belukar **tanpa pembakaran.**
- 2) Pengolahan lahan sampai kondisi siap tanam, dapat berupa pekerjaan pencangkulan atau pembajakan, perataan bidang olah, pembuatan petak-petak, pengguludan, surjan, tabukan, pembuatan lubang tanam dan kegiatan lainnya tergantung komoditas yang akan ditanam.
- 3) Perbaikan kesuburan, dilakukan pada lahan-lahan yang tidak atau kurang subur dengan cara perbaikan fisik dan kimia tanah melalui pemberian pupuk organik(kompos, zeolit, kotoran hewan dan lain-lain) maupun pupuk anorganik (urea, KCl, ZA dan lain-lain), pengapuran sesuai dengan kebutuhan serta upaya lain sesuai dengan faktor keterbatasan lahan/kondisi lahan setempat.

4) Perbaiki sarana dan prasarana, dengan melakukan upaya perbaikan/ optimasi sarana dan prasarana yang diperlukan (saluran irigasi dll).

b. Penyediaan Sarana Produksi dan Alat Mesin Pertanian

Penyediaan sarana produksi berupa benih/ bibit tanaman, pupuk (organik / anorganik), pestisida (insektisida dan herbisida) dan peralatan pertanian ringan (seperti hand sprayer, chopper, hand traktor dan peralatan lainnya yang diperlukan di lapangan).

c. Penanaman

Penanaman dilakukan sesuai dengan teknologi produksi spesifik lokasi, yang efisien dan ramah lingkungan.

Sesuai jadwal kegiatan, maka khusus untuk padi penanaman dilaksanakan mulai Musim Tanam April s/d September 2013 dan pada akhir tahun 2013 harus sudah berproduksi (panen)

d. Pemeliharaan

Pemeliharaan hasil pelaksanaan kegiatan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat secara swadaya, terutama petani yang mendapatkan manfaat langsung dari kegiatan optimasi lahan.

C. Jadwal Kegiatan

Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota supaya mengikuti jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai tahapan kegiatan optimasi lahan, yang dituangkan dalam "**Jadwal Palang**" pada Lampiran 3.

D. Pendanaan

Biaya pelaksanaan kegiatan optimasi lahan dibiayai dari dana Tugas Pembantuan (TP) tahun 2013 sebesar Rp. 2.100.000,-/Ha. Penggunaan dana dilakukan dengan perincian sebagai berikut :

- Belanja Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat dalam bentuk uang (573111) Rp. 2.075.000,-

Belanja Bantuan Sosial ini diguynakan untuk belanja penyediaan sarana produksi seperti benih/ bibit tanaman, pupuk (organik / anorganik), pestisida (insktisida dan herbisida) dan peralatan pertanian ringan (seperti hand sprayer, chopper, hand traktor dan peralatan lainnya yang diperlukan di lapangan

- Belanja Perjalanan lainnya (524119) Rp. 300.000,- (3 OH per 20 Ha)

Pada luasan per 20 Ha disediakan bantuan transport untuk pembinaan di lapangan sebanyak 3 OH.

- Belanja Barang Non Operasional Lainnya (521219) untuk sosialisasi / pengawalan

Pada luasan per 20 Ha disediakan dana untuk sosialisasi atau pengawalan sebesar Rp. 200.000,-

Dalam pelaksanaan bantuan sosial untuk kegiatan optimasi lahan agar mengacu pada Pedoman Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Tahun 2013 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

Untuk kegiatan yang bersifat non fisik antara lain; koordinasi, inventarisasi CPCL, Rancangan Teknis sederhana, musyawarah kelompok tani (rembug desa), pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan menggunakan dana Administrasi Kegiatan, bila tidak

mencukupi diharapkan dapat disediakan dari dana APBD.

Untuk pemeliharaan dan keberlanjutan hasil kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab masyarakat petani secara swadaya.

V. PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Dalam pelaksanaan optimasi lahan dilakukan kegiatan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan oleh Tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

A. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Propinsi

Kegiatan di Tingkat Propinsi dilaksanakan oleh Dinas Lingkup Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan), sebagai berikut :

1. Menyusun petunjuk pelaksanaan sebagai penjabaran dari pedoman teknis pusat yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.
2. Melakukan bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi.
3. Menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan dan disampaikan ke Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan.

B. Tugas dan Tanggung Jawab Dinas Kabupaten/ Kota

Kegiatan fisik optimasi lahan dilaksanakan oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota, sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait.
2. Menyusun petunjuk teknis sebagai penjabaran dari petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Propinsi yang disesuaikan dengan kondisi lokalita setempat.
3. Melaksanakan identifikasi calon petani dan calon lokasi (CPCL)
4. Menetapkan CPCL melalui SK Kepala Dinas Kabupaten
5. Melaksanakan pembangunan fisik kegiatan optimasi lahan melalui mekanisme bantuan sosial (transfer uang)
6. Melaksanakan bimbingan teknis kepada para petugas lapangan dan petani peserta pelaksana kegiatan.
7. Menyusun laporan dan dokumentasi (sebelum, sedang dan sesudah) pelaksanaan kegiatan, yang disampaikan ke Propinsi dan tembusan ke Pusat secara berkala.

C. Format Laporan

Jenis laporan sebagai berikut :

1. Laporan Bulanan

Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota wajib membuat laporan bulanan. Dinas lingkup pertanian propinsi merekapitulasi laporan dari dinas lingkup pertanian Kab./Kota.

Format laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Kabupaten/Kota sesuai format laporan PSP 01 dan PSP 03 sebagaimana pada lampiran 4. Sedangkan format laporan yang dibuat oleh Dinas lingkup pertanian Propinsi sesuai format laporan PSP 02 dan PSP 04 sebagaimana pada lampiran 5.

2. Laporan Akhir

Laporan akhir agar lebih informatif dan komunikatif dilengkapi dengan foto-foto dokumentasi (sebelum, sedang dan selesai pelaksanaan kegiatan). Outline laporan akhir sebagaimana pada lampiran 6.

D. Alur Laporan

Laporan diperlukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dan permasalahan serta upaya pemecahan dalam mencapai sasaran. Laporan ini berisi antara lain data dan informasi tentang perkembangan pelaksanaan fisik dan keuangan, pendayagunaan tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja, pembayaran tenaga kerja, hasil kerja fisik dan lain-lain.

Alur laporan sebagai berikut :

1. Laporan bulanan dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten / Kota dan dikirim ke Propinsi untuk diolah lebih lanjut dengan tembusan ke Pusat.
2. Laporan bulanan yang dibuat oleh Dinas Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota selanjutnya direkapitulasi oleh Dinas Lingkup Pertanian Propinsi dan dikirim ke Pusat dengan alamat :

**Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian
Jl. Taman Margasatwa No. 3 Ragunan
Jakarta Selatan 12550.
Telp. : 021-7805552
Fax. : 021-7805552**

3. Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten / Kota dan dikirim ke Dinas lingkup Pertanian Propinsi untuk diolah lebih lanjut, dengan tembusan ke Pusat.
4. Laporan akhir dibuat oleh Dinas lingkup Pertanian Propinsi berdasarkan hasil laporan dari Dinas lingkup Pertanian Kabupaten / Kota kemudian dikirim ke pusat.
5. Waktu pengiriman
 - a. Laporan bulanan kabupaten dikirim paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya.
 - b. Laporan bulanan propinsi dikirim paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

VI. INDIKATOR KINERJA OPTIMASI LAHAN

Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan kegiatan optimasi lahan maka ditentukan indikator kinerja sebagai berikut :

A. Indikator Keluaran (Outputs)

Meningkatnya pemanfaatan lahan terlantar dan IP rendah seluas 253.300 ha, terdiri dari kawasan tanaman pangan 227.620 ha, hortikultura 5.880 ha, perkebunan 19.640 ha dan peternakan 160 ha.

B. Indikator Hasil (Outcomes)

1. Meningkatnya indeks pertanaman (IP) pada kawasan tanaman pangan sebesar 150 % sedangkan pada kawasan hortikultura, perkebunan dan peternakan masing-masing sebesar 100 %.
2. Meningkatnya areal tanam pada kawasan tanaman pangan seluas 227.620 ha, kawasan hortikultura seluas 5.880 ha, kawasan perkebunan seluas 19.640 ha dan kawasan peternakan seluas 160 ha.

C. Indikator Manfaat (Benefits)

1. Membaiknya sarana dan prasarana pada kawasan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan.
2. Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat petani.
2. Terciptanya mekanisme kerja kelompok tani yang efektif dan efisien

D. Indikator Dampak (Impacts)

1. Terciptanya kehidupan masyarakat yang lebih baik.
2. Terciptanya sumber-sumber pertumbuhan ekonomi di 442 kabupaten/kota.
3. Terwujudnya Ketahanan Pangan Daerah dan Nasional

VII. PENUTUP

Kegiatan optimasi lahan dilaksanakan pada lahan pertanian yang sementara tidak diusahakan dan lahan indeks pertanaman (IP) rendah yang semula merupakan lahan bermasalah untuk usahatani.

Oleh karena itu hasil yang telah diperoleh dari kegiatan optimasi lahan perlu dipelihara oleh petani agar memberikan manfaat sebesar-besarnya secara berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal ini perlu dilakukan bimbingan dan pembinaan secara terus-menerus oleh Dinas lingkup Pertanian Kabupaten/Kota dan petugas lapangan.

Lampiran 1

**Lokasi Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan
TA. 2013**

	PROVINSI / KABUPATEN	TP	HOR	BUN	NAK	JML	SATUAN BIAYA	TOTAL ANGGARAN
	T O T A L	227,620	5,880	19,640	160	253,300	2,100,000	531,830,000,000
1	JAWA BARAT	15,820	560	-	-	16,380	2,100,000	34,298,000,000
	1 Bandung	1,140	80			1,220	2,100,000	2,562,000,000
	2 Bekasi	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	3 Clamis	840	80			920	2,100,000	1,932,000,000
	4 Cianjur	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	5 garut	1,000				1,000	2,100,000	2,100,000,000
	6 Indramayu	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	7 karawang	2,000				2,000	2,100,000	4,200,000,000
	8 kuningan	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	9 Majalengka	400	80			480	2,100,000	1,008,000,000
	10 purwakarta	300				300	2,100,000	630,000,000
	11 subang	1,500				1,500	2,100,000	3,150,000,000
	12 sumedang	800				800	2,100,000	1,680,000,000
	13 tasikmalaya	1,140	80			1,220	2,100,000	2,562,000,000
	14 kota bandung	200				200	2,100,000	420,000,000
	15 kota bekasi	240				240	2,100,000	504,000,000
	16 kota bogor	240				240	2,100,000	504,000,000
	17 kota cirebon	200				200	2,100,000	420,000,000
	18 kota sukabumi	200	80			280	2,100,000	588,000,000
	19 Kota Tasikmalaya	640				640	2,100,000	1,344,000,000
	20 kota banjar	200				200	2,100,000	420,000,000
	21 sukabumi	1,500				1,500	2,100,000	3,150,000,000
	22 cirebon	600	80			680	2,100,000	1,428,000,000
	23 bogor	340	80			420	2,100,000	882,000,000
	24 bandung barat	340				340	2,100,000	714,000,000
2	JAWA TENGAH	23,740	320	3,520	-	27,580	2,100,000	57,918,000,000
	25 Sragen	800		140		940	2,100,000	1,974,000,000
	26 Banjarnegara	500		300		800	2,100,000	1,680,000,000
	27 Banyumas	600		140		740	2,100,000	1,554,000,000
	28 Pati	500		140		740	2,100,000	1,554,000,000
	29 Kudus	500		140		640	2,100,000	1,344,000,000
	30 Rembang	500		140		640	2,100,000	1,344,000,000
	31 Magelang	600		140		740	2,100,000	1,554,000,000
	32 Wonosobo	500		140		640	2,100,000	1,344,000,000
	33 Batang	500		140		640	2,100,000	1,344,000,000
	34 Kebumen	500		140		640	2,100,000	1,344,000,000
	35 Purworejo	1,800	80	140		2,020	2,100,000	4,242,000,000
	36 Demak	500		140		600	2,100,000	1,260,000,000
	37 Jepara	540		140		680	2,100,000	1,428,000,000
	38 Semarang	1,500	80			1,580	2,100,000	3,318,000,000
	39 Temanggung	1,400		140		1,540	2,100,000	3,234,000,000
	40 Wonogiri	1,000		140		1,140	2,100,000	2,394,000,000
	41 Boyolali	540		140		680	2,100,000	1,428,000,000
	42 Karang Anyar	540		140		680	2,100,000	1,428,000,000
	43 Pekalongan	1,500		140		1,640	2,100,000	3,444,000,000
	44 Blora	660		140		800	2,100,000	1,680,000,000
	45 Brebes	840	80	140		1,060	2,100,000	2,226,000,000
	46 Cilacap	2,000		140		2,140	2,100,000	4,494,000,000
	47 Grobogan	540		140		680	2,100,000	1,428,000,000
	48 Kendal	700		140		840	2,100,000	1,764,000,000
	49 Pemalang	1,500		140		1,640	2,100,000	3,444,000,000
	50 Purbalingga	2,000		140		2,140	2,100,000	4,494,000,000
	51 Tegal	340		140		480	2,100,000	1,008,000,000
	52 Kota Salatiga	240				240	2,100,000	504,000,000
	53 Kota Semarang		80			80	2,100,000	168,000,000
3	DIV	1,260	80	240	-	1,580	2,100,000	3,318,000,000
	54 Sleman	340				340	2,100,000	714,000,000
	55 Bantul	340		140		480	2,100,000	1,008,000,000
	56 Gunung Kidul	340	80	100		520	2,100,000	1,092,000,000
	57 Kulon Progo	240				240	2,100,000	504,000,000

4	JAWA TIMUR	18,860	600	2,020	-	21,480	2,100,000	45,108,000,000
	58 Bangkalan	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	59 Banyuwangi	500	80			580	2,100,000	1,218,000,000
	60 Blitar	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	61 Bojonegoro	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	62 Bondowoso	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	63 Gresik	400	200			600	2,100,000	1,260,000,000
	64 Jember	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	65 Jombang	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	66 Kediri	500		420		920	2,100,000	1,932,000,000
	67 Lamongan	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	68 Lumajang	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	69 Madiun	500		200		700	2,100,000	1,470,000,000
	70 Magetan	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	71 Malang	500	80			580	2,100,000	1,218,000,000
	72 Mojokerto	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	73 Nganjuk	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	74 Ngawi	500		1,000		1,500	2,100,000	3,150,000,000
	75 Pacitan	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	76 Pamekasan	1,000				1,000	2,100,000	2,100,000,000
	77 Pasuruan	400	80			480	2,100,000	1,008,000,000
	78 Ponorogo	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	79 Probolinggo	500	80			580	2,100,000	1,218,000,000
	80 Sampang	2,000	80			2,080	2,100,000	4,368,000,000
	81 Sidoarjo	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	82 Situbondo	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	83 Sumenep	1,400				1,400	2,100,000	2,940,000,000
	84 Trenggalek	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	85 Tuban	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	86 Tulungagung	1,360		400		1,760	2,100,000	3,696,000,000
	87 Kota Bitar	100				100	2,100,000	210,000,000
	88 Kota Kediri	100				100	2,100,000	210,000,000
	89 Kota Madiun	100				100	2,100,000	210,000,000
	90 Kota Malang	100				100	2,100,000	210,000,000
	91 Kota Mojokerto	100				100	2,100,000	210,000,000
	92 Kota Pasuruan	100				100	2,100,000	210,000,000
	93 Kota Probolinggo	100				100	2,100,000	210,000,000
	94 Kota Batu	100				100	2,100,000	210,000,000
5	NAD	12,540	160	1,600	-	14,300	2,100,000	30,030,000,000
	95 Aceh Barat	700				700	2,100,000	1,470,000,000
	96 Aceh Besar	700				700	2,100,000	1,470,000,000
	97 Aceh Selatan	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	98 Aceh Singkil	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	99 Aceh Tengah	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	100 Aceh Tenggara	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	101 Aceh Timur	500		140		640	2,100,000	1,344,000,000
	102 Aceh Utara	500		240		740	2,100,000	1,554,000,000
	103 Bireun	500		440		940	2,100,000	1,974,000,000
	104 Pidie	500	80			580	2,100,000	1,218,000,000
	105 Pidie Jaya	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	106 Simeuleu	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	107 Kota Subulussalam	240				240	2,100,000	504,000,000
	108 Kota Langsa	160				160	2,100,000	336,000,000
	109 Kota Lhokseumawe	240				240	2,100,000	504,000,000
	110 Gayo Lues			140		140	2,100,000	294,000,000
	111 Aceh Barat Daya	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	112 Aceh Jaya	800				800	2,100,000	1,680,000,000
	113 Nagan Raya	1,400				1,400	2,100,000	2,940,000,000
	114 Aceh Tamiang	2,500		500		3,000	2,100,000	6,300,000,000
	115 Bener Meriah	300	80	140		520	2,100,000	1,092,000,000
6	SUMATERA UTARA	15,040	560	-	-	15,600	2,100,000	32,760,000,000
	116 Asahan	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	117 Dairi	700				700	2,100,000	1,470,000,000
	118 Deli Serdang	700	80			780	2,100,000	1,638,000,000
	119 Tanah Karo	500	80			580	2,100,000	1,218,000,000
	120 Labuhan Batu	500	80			580	2,100,000	1,218,000,000
	121 Labuhan Batu Utara	600				600	2,100,000	1,260,000,000
	122 Labuhan Batu Selatan	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	123 Langkat	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	124 Mandailing Natal	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	125 Nias	500				500	2,100,000	1,050,000,000

126	Nias Selatan	500				500	2,100,000	1,050,000,000
127	Nias Utara	500				500	2,100,000	1,050,000,000
128	Nias Barat	500				500	2,100,000	1,050,000,000
129	Simalungun	700	80			780	2,100,000	1,638,000,000
130	Tapanuli Selatan	500	80			580	2,100,000	1,218,000,000
131	Tapanuli Tengah	500	80			580	2,100,000	1,218,000,000
132	Tapanuli Utara	600				600	2,100,000	1,260,000,000
133	Toba Samosir	500	80			580	2,100,000	1,218,000,000
134	Pakpak Barat	500				500	2,100,000	1,050,000,000
135	Humbang Hasundutan	500				500	2,100,000	1,050,000,000
136	Samosir	500				500	2,100,000	1,050,000,000
137	Serdang Bedagai	700				700	2,100,000	1,470,000,000
138	Padang Lawas	500				500	2,100,000	1,050,000,000
139	Batu Bara	500				500	2,100,000	1,050,000,000
140	Padang Lawas Utara	500				500	2,100,000	1,050,000,000
141	Kota Binjai	340				340	2,100,000	714,000,000
142	Kota Medan	360				360	2,100,000	756,000,000
143	Kota Pematang Siantar	340				340	2,100,000	714,000,000
144	Kota Padang Sidempuan	260				260	2,100,000	546,000,000
145	Kota Gunung Sitoli	240				240	2,100,000	504,000,000
7	SUMATERA BARAT	7,740	160	420	-	8,320	2,100,000	17,472,000,000
146	LIMA PULUH KOTA	500				500	2,100,000	1,050,000,000
147	AGAM	260		140		400	2,100,000	840,000,000
148	KEPULAUAN MENTAWAI	260				260	2,100,000	546,000,000
149	PADANG PARIAMAN	500				500	2,100,000	1,050,000,000
150	PASAMAN	500				500	2,100,000	1,050,000,000
151	PESISIR SELATAN	600	80	140		820	2,100,000	1,722,000,000
152	SAWAH LUNTO SIJUNJUNG	800				800	2,100,000	1,680,000,000
153	SOLOK	500	80	140		720	2,100,000	1,512,000,000
154	TANAH DATAR	800				800	2,100,000	1,680,000,000
155	KOTA BUKIT TINGGI	260				260	2,100,000	546,000,000
156	KOTA PADANG PANJANG	240				240	2,100,000	504,000,000
157	KOTA PADANG	260				260	2,100,000	546,000,000
158	KOTA PAYAKUMBUH	240				240	2,100,000	504,000,000
159	KOTA PARIAMAN	260				260	2,100,000	546,000,000
160	DHARMASTRAYA	500				500	2,100,000	1,050,000,000
161	SOLOK SELATAN	260				260	2,100,000	546,000,000
162	PASAMAN BARAT	500				500	2,100,000	1,050,000,000
163	SIJUNJUNG	500				500	2,100,000	1,050,000,000
8	RIAU	3,480	-	340	-	3,820	2,100,000	8,022,000,000
164	Bengkalis	400				400	2,100,000	840,000,000
165	Indragiri Hilir	240				240	2,100,000	504,000,000
166	Indragiri Hulu	260				260	2,100,000	546,000,000
167	Kampar	240		200		440	2,100,000	924,000,000
168	Kuantan Singingi	260				260	2,100,000	546,000,000
169	Pelalawan	240				240	2,100,000	504,000,000
170	Rokan Hilir	200		140		340	2,100,000	714,000,000
171	Rokan Hulu	640				640	2,100,000	1,344,000,000
172	Siak	360				360	2,100,000	756,000,000
173	Kepulauan Meranti	640				640	2,100,000	1,344,000,000
9	JAMBI	2,580	160	140	-	2,880	2,100,000	6,048,000,000
174	Batanghari	260				260	2,100,000	546,000,000
175	Muaro Bungo	440		140		580	2,100,000	1,218,000,000
176	Kerinci	60	80			140	2,100,000	294,000,000
177	Merangin	240				240	2,100,000	504,000,000
178	Muaro Jambi	260				260	2,100,000	546,000,000
179	Sarolangun	240				240	2,100,000	504,000,000
180	Tanjung Jabung Barat	260	80			340	2,100,000	714,000,000
181	Tanjung Jabung Timur	320				320	2,100,000	672,000,000
182	Tebo	260				260	2,100,000	546,000,000
183	Muara Bulian	240				240	2,100,000	504,000,000
10	SUMATERA SELATAN	8,280	240	560	-	9,080	2,100,000	19,068,000,000
184	Lahat	360				360	2,100,000	756,000,000
185	Musi Banyuasin	340				340	2,100,000	714,000,000
186	Musi Rawas	360		140		500	2,100,000	1,050,000,000
187	Muara Enim	400		140		540	2,100,000	1,134,000,000
188	Ogan Komering Ilir	1,800	80	140		2,020	2,100,000	4,242,000,000
189	Ogan Komering Ulu	500	80	140		720	2,100,000	1,512,000,000
190	Kota Palembang	400				400	2,100,000	840,000,000

191	Kota Prabumulih	240				240	2,100,000	504,000,000
192	Kota Pagar Alam	260				260	2,100,000	546,000,000
193	Banyuasin	540				540	2,100,000	1,134,000,000
194	OKU Timur	560				560	2,100,000	1,176,000,000
195	OKU Selatan	500				500	2,100,000	1,050,000,000
196	Ogan Ilir	1,400	80			1,480	2,100,000	3,108,000,000
197	Lubuk Linggau	140				140	2,100,000	294,000,000
198	Empat Lawang	480				480	2,100,000	1,008,000,000
11	LAMPUNG	15,780	160	280	-	16,220	2,100,000	34,062,000,000
199	Lampung Barat	1,000		140		1,140	2,100,000	2,394,000,000
200	Lampung Selatan	900	80			980	2,100,000	2,058,000,000
201	Lampung Tengah	1,400				1,400	2,100,000	2,940,000,000
202	Lampung Utara	900		140		1,040	2,100,000	2,184,000,000
203	Lampung Timur	1,500				1,500	2,100,000	3,150,000,000
204	Tanggamus	640				640	2,100,000	1,344,000,000
205	Tulang Bawang	1,500				1,500	2,100,000	3,150,000,000
206	Tulang Bawang Barat	900				900	2,100,000	1,890,000,000
207	Way Kanan	1,500				1,500	2,100,000	3,150,000,000
208	Pringsewu	1,500				1,500	2,100,000	3,150,000,000
209	Pesawaran	1,300				1,300	2,100,000	2,730,000,000
210	Mesuji	2,000	80			2,080	2,100,000	4,368,000,000
211	Kota Bandar Lampung	240				240	2,100,000	504,000,000
212	Kota Metro	500				500	2,100,000	1,050,000,000
12	KALIMANTAN BARAT	6,560	-	-	-	6,560	2,100,000	13,776,000,000
213	Bengkayang	660				660	2,100,000	1,386,000,000
214	landak	340				340	2,100,000	714,000,000
215	kapuas hulu	260				260	2,100,000	546,000,000
216	ketapang	800				800	2,100,000	1,680,000,000
217	pontianak	240				240	2,100,000	504,000,000
218	Sambas	660				660	2,100,000	1,386,000,000
219	Sanggau	800				800	2,100,000	1,680,000,000
220	Sintang	400				400	2,100,000	840,000,000
221	kota singkawang	340				340	2,100,000	714,000,000
222	melawi	800				800	2,100,000	1,680,000,000
223	sekadau	360				360	2,100,000	756,000,000
224	Kubu Raya	640				640	2,100,000	1,344,000,000
225	kayong utara	260				260	2,100,000	546,000,000
13	KALIMANTAN TENGAH	5,840	160	-	-	6,000	2,100,000	12,600,000,000
226	barito selatan	400				400	2,100,000	840,000,000
227	barito utara	240				240	2,100,000	504,000,000
228	kapuas	500	80			580	2,100,000	1,218,000,000
229	kotawaringin barat	400				400	2,100,000	840,000,000
230	kota palangka raya	240	80			320	2,100,000	672,000,000
231	katingan	500				500	2,100,000	1,050,000,000
232	seruyan	900				900	2,100,000	1,890,000,000
233	sukamara	340				340	2,100,000	714,000,000
234	lamandau	360				360	2,100,000	756,000,000
235	gunung mas	860				860	2,100,000	1,806,000,000
236	pulang pisau	500				500	2,100,000	1,050,000,000
237	murung raya	240				240	2,100,000	504,000,000
238	barito timur	360				360	2,100,000	756,000,000
14	KALIMANTAN SELATAN	6,080	160	100	-	6,340	2,100,000	13,314,000,000
239	Banjarnegara	340				340	2,100,000	714,000,000
240	Barito Kuala	660		100		760	2,100,000	1,596,000,000
241	Hulu Sungai Selatan	500				500	2,100,000	1,050,000,000
242	hulu sungai tengah	500				500	2,100,000	1,050,000,000
243	hulu sungai utara	300				300	2,100,000	630,000,000
244	kotabaru	540				540	2,100,000	1,134,000,000
245	tabalong	500				500	2,100,000	1,050,000,000
246	Tanah Laut	500				500	2,100,000	1,050,000,000
247	tapin	500	80			580	2,100,000	1,218,000,000
248	Kota Banjar baru	240	80			320	2,100,000	672,000,000
249	Kota Banjarmasin	260				260	2,100,000	546,000,000
250	Balangan	500				500	2,100,000	1,050,000,000
251	tanahumbu	500				500	2,100,000	1,050,000,000
252	Hulu Sungai Timur	240				240	2,100,000	504,000,000

15	KALIMANTAN TIMUR	2,680	160	220	-	3,060	2,100,000	6,426,000,000
	253 berau	260				260	2,100,000	546,000,000
	254 bulungan	360				360	2,100,000	756,000,000
	255 Kutai Kertanegara	240				240	2,100,000	504,000,000
	256 Kutai Barat	240				240	2,100,000	504,000,000
	257 Kutai timur	260				260	2,100,000	546,000,000
	258 Malinau	240				240	2,100,000	504,000,000
	259 nunukan	240		140		380	2,100,000	798,000,000
	260 Paser	240	80			320	2,100,000	672,000,000
	261 penajam paser utara	340		80		420	2,100,000	882,000,000
	262 Kota Balikpapan	260	80			340	2,100,000	714,000,000
16	SULAWESI UTARA	6,240	80	840	-	7,160	2,100,000	15,036,000,000
	263 Bolaang mongondow	600		140		740	2,100,000	1,554,000,000
	264 bolaang mongondow utara	600				600	2,100,000	1,260,000,000
	265 Bolaang Mongondow Timu	600				600	2,100,000	1,260,000,000
	266 Bolaang Mongondow Selat	600				600	2,100,000	1,260,000,000
	267 minahasa	700				700	2,100,000	1,470,000,000
	268 minahasa selatan	900	80			980	2,100,000	2,058,000,000
	269 minahasa utara	700		300		1,000	2,100,000	2,100,000,000
	270 minahasa Tenggara	600				600	2,100,000	1,260,000,000
	271 Sangihe	360				360	2,100,000	756,000,000
	272 bitung	60				60	2,100,000	126,000,000
	273 Kep. Talaud	160				160	2,100,000	336,000,000
	274 Kota Tomohon	60		400		460	2,100,000	966,000,000
	275 Kota Manado	100				100	2,100,000	210,000,000
	276 Kota Kotamobagu	200				200	2,100,000	420,000,000
17	SULAWESI TENGAH	4,780	80	700	-	5,560	2,100,000	11,676,000,000
	277 banggai	250				250	2,100,000	525,000,000
	278 banggai kepulauan	340				340	2,100,000	714,000,000
	279 buol	360				360	2,100,000	756,000,000
	280 toli-toli	300				300	2,100,000	630,000,000
	281 Donggala	660	80			740	2,100,000	1,554,000,000
	282 morowali	360				360	2,100,000	756,000,000
	283 poso	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	284 kota palu	260				260	2,100,000	546,000,000
	285 Parigi moutong	950		700		1,650	2,100,000	3,465,000,000
	286 tojo una-una	260				260	2,100,000	546,000,000
	287 sigi	540				540	2,100,000	1,134,000,000
18	SULAWAI SELATAN	21,380	400	560	-	22,340	2,100,000	46,914,000,000
	288 bantaeng	660	80			740	2,100,000	1,554,000,000
	289 barru	1,800	80			1,880	2,100,000	3,948,000,000
	290 bone	640				640	2,100,000	1,344,000,000
	291 bulukumba	660				660	2,100,000	1,386,000,000
	292 enrekang	1,100				1,100	2,100,000	2,310,000,000
	293 gowa	1,000				1,000	2,100,000	2,100,000,000
	294 jenepono	860		40		900	2,100,000	1,890,000,000
	295 luwu	980	80			1,060	2,100,000	2,226,000,000
	296 luwu utara	700				700	2,100,000	1,470,000,000
	297 maros	1,100				1,100	2,100,000	2,310,000,000
	298 pangkep	1,800	80	40		1,920	2,100,000	4,032,000,000
	299 pinrang	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	300 Selayar	500				500	2,100,000	1,050,000,000
	301 sidenreng rappang	840				840	2,100,000	1,764,000,000
	302 sinjai	860				860	2,100,000	1,806,000,000
	303 soppeng	840				840	2,100,000	1,764,000,000
	304 takalar	800				800	2,100,000	1,680,000,000
	305 tana toraja	800		260		1,060	2,100,000	2,226,000,000
	306 wajo	1,700				1,700	2,100,000	3,570,000,000
	307 kota makassar	240				240	2,100,000	504,000,000
	308 kota palopo	660	80			740	2,100,000	1,554,000,000
	309 luwu timur	840				840	2,100,000	1,764,000,000
	310 toraja utara	1,500		220		1,720	2,100,000	3,612,000,000
19	SULAWESI TENGGARA	3,180	240	4,240	-	7,660	2,100,000	16,086,000,000
	311 Buton	240		200		440	2,100,000	924,000,000
	312 Buton Utara	500	80	240		820	2,100,000	1,722,000,000
	313 Konawe Selatan	500		400		900	2,100,000	1,890,000,000
	314 Konawe Utara	260		500		760	2,100,000	1,596,000,000
	315 Kolaka	300	80	1,500		1,880	2,100,000	3,948,000,000

316	Kolaka Utara	240		300		540	2.100.000	1.134.000.000
317	Muna	300		800		1.100	2.100.000	2.310.000.000
318	Kota Baubau	240				240	2.100.000	504.000.000
319	Bombana	300				300	2.100.000	630.000.000
320	Kota Kendari	300	80			380	2.100.000	798.000.000
321	Konawe			300		300	2.100.000	630.000.000
20	MALUKU	3.000	80	-	-	3.080	2.100.000	6.468.000.000
322	Kepulauan Buru	340				340	2.100.000	714.000.000
323	Buru Selatan	360				360	2.100.000	756.000.000
324	Seram Bagian Barat	340				340	2.100.000	714.000.000
325	Seram Bagian Timur	360				360	2.100.000	756.000.000
326	Maluku Tengah	340				340	2.100.000	714.000.000
327	Maluku Tenggara	360				360	2.100.000	756.000.000
328	Maluku Tenggara Barat	400	80			480	2.100.000	1.008.000.000
329	Aru	260				260	2.100.000	546.000.000
330	Maluku Barat Daya	240				240	2.100.000	504.000.000
21	BALI	4.900	240	800	160	6.100	2.100.000	12.810.000.000
331	Badung	500				500	2.100.000	1.050.000.000
332	Bangli	500	80			580	2.100.000	1.218.000.000
333	Buteleng	600		200		800	2.100.000	1.680.000.000
334	Gianyar	600	80			680	2.100.000	1.428.000.000
335	Jembrana	600				600	2.100.000	1.260.000.000
336	Karangasem	600	80	140		820	2.100.000	1.722.000.000
337	Klungkung	600		100		700	2.100.000	1.470.000.000
338	Tabanan	640		360	160	1.160	2.100.000	2.436.000.000
339	kota Denpasar	260				260	2.100.000	546.000.000
22	NTB	5.320	160	360	-	5.840	2.100.000	12.264.000.000
340	bima	500				500	2.100.000	1.050.000.000
341	dompu	500				500	2.100.000	1.050.000.000
342	lombok barat	500	80			580	2.100.000	1.218.000.000
343	lombok tengah	500				500	2.100.000	1.050.000.000
344	lombok timur	700	80	200		980	2.100.000	2.058.000.000
345	lombok utara	700				700	2.100.000	1.470.000.000
346	sumbawa	700	160			860	2.100.000	1.806.000.000
347	sumbawa barat	700				700	2.100.000	1.470.000.000
348	kota mataram	260				260	2.100.000	546.000.000
349	kota bima	260				260	2.100.000	546.000.000
23	NTT	7.420	240	1.060	-	8.720	2.100.000	18.312.000.000
350	kota kupang	260				260	2.100.000	546.000.000
351	kupang	400				400	2.100.000	840.000.000
352	Timor tengah selatan	360	80	160		600	2.100.000	1.260.000.000
353	timor tengah utara	340				340	2.100.000	714.000.000
354	belu	500				500	2.100.000	1.050.000.000
355	Alor	360		500		860	2.100.000	1.806.000.000
356	lembata	300				300	2.100.000	630.000.000
357	mangaral	360				360	2.100.000	756.000.000
358	sumba barat	340	80			420	2.100.000	882.000.000
359	sumba timur	360				360	2.100.000	756.000.000
360	rote ndao	300				300	2.100.000	630.000.000
361	mangaral barat	800	80			880	2.100.000	1.848.000.000
362	Ende	260				260	2.100.000	546.000.000
363	nagekeo	260				260	2.100.000	546.000.000
364	Ngada	260				260	2.100.000	546.000.000
365	sikka	260				260	2.100.000	546.000.000
366	flores timur	260				260	2.100.000	546.000.000
367	sumba barat daya	500		400		900	2.100.000	1.890.000.000
368	sumba tengah	340				340	2.100.000	714.000.000
369	mangaral timur	340				340	2.100.000	714.000.000
370	sabu rajua	260				260	2.100.000	546.000.000
24	PAPUA	6.700	160	660	-	7.520	2.100.000	15.792.000.000
371	Biak Numfor	260				260	2.100.000	546.000.000
372	Jayapura	500				500	2.100.000	1.050.000.000
373	Jayawijaya	300				300	2.100.000	630.000.000
374	Werauke	800	80	260		1.140	2.100.000	2.394.000.000
375	Mimika	260				260	2.100.000	546.000.000
376	Nabire	500		260		760	2.100.000	1.596.000.000
377	Yapen Waropen	-				0	2.100.000	0
378	Kepulauan Yapen	260				260	2.100.000	546.000.000
379	Kota Jayapura	260	80	140		480	2.100.000	1.008.000.000
380	Sarmi	260				260	2.100.000	546.000.000
381	Keerom	500				500	2.100.000	1.050.000.000
382	Yahukimo	300				300	2.100.000	630.000.000
383	Boven Diguit	300				300	2.100.000	630.000.000
384	Mappi	500				500	2.100.000	1.050.000.000
385	Asmat	260				260	2.100.000	546.000.000
386	Waropen	500				500	2.100.000	1.050.000.000

381	Keerom	500				500	2,100,000	1,050,000,000
382	Yahukimo	300				300	2,100,000	630,000,000
383	Boven Digul	300				300	2,100,000	630,000,000
384	Mappi	500				500	2,100,000	1,050,000,000
385	Asmat	260				260	2,100,000	546,000,000
386	Waropen	500				500	2,100,000	1,050,000,000
387	Yalimo	260				260	2,100,000	546,000,000
388	Memberamo Tengah	260				260	2,100,000	546,000,000
389	Nduga	260				260	2,100,000	546,000,000
390	suptiori	160				160	2,100,000	336,000,000
25	BENGKULU	2,680	240	140	-	3,060	2,100,000	6,426,000,000
391	bengkulu selatan	400				400	2,100,000	840,000,000
392	bengkulu utara	400				400	2,100,000	840,000,000
393	REJANG LEBONG	400	80			480	2,100,000	1,008,000,000
394	kaur	260				260	2,100,000	546,000,000
395	SELUMA	260		140		400	2,100,000	840,000,000
396	MUKO-MUKO	260				260	2,100,000	546,000,000
397	LEBONG	200	80			280	2,100,000	588,000,000
398	KEPAHIANG	260	80			340	2,100,000	714,000,000
399	BENGKULU TENGAH	240				240	2,100,000	504,000,000
26	MALUKU UTARA	1,400	-	-	-	1,400	2,100,000	2,940,000,000
400	Halmahera Tengah	240				240	2,100,000	504,000,000
401	Halmahera Barat	260				260	2,100,000	546,000,000
402	Halmahera Selatan	260				260	2,100,000	546,000,000
403	Halmahera Timur	240				240	2,100,000	504,000,000
404	Kepulauan Sula	200				200	2,100,000	420,000,000
405	Halmahera Utara	200				200	2,100,000	420,000,000
27	BANTEN	2,260	160	-	-	2,420	2,100,000	5,082,000,000
406	Lebak	500				500	2,100,000	1,050,000,000
407	Pandeglang	500	160			660	2,100,000	1,386,000,000
408	Serang	500				500	2,100,000	1,050,000,000
409	Tangerang	500				500	2,100,000	1,050,000,000
410	Kota Cilegon	260				260	2,100,000	546,000,000
28	BANGKA BELITUNG	1,520	-	-	-	1,520	2,100,000	3,192,000,000
411	Belitung	100				100	2,100,000	210,000,000
412	Bangka Barat	300				300	2,100,000	630,000,000
413	Bangka Tengah	100				100	2,100,000	210,000,000
414	Bangka Selatan	440				440	2,100,000	924,000,000
415	Belitung Timur	580				580	2,100,000	1,218,000,000
29	GORONTALO	3,200	80	380	-	3,660	2,100,000	7,686,000,000
416	Boalemo	1,000				1,000	2,100,000	2,100,000,000
417	Gorontalo	520	80	80		680	2,100,000	1,428,000,000
418	Kota Gorontalo	260				260	2,100,000	546,000,000
419	Pohuwato	560		140		700	2,100,000	1,470,000,000
420	Bone Bolango	360				360	2,100,000	756,000,000
421	Gorontalo Utara	500		160		660	2,100,000	1,386,000,000
30	KEPULAUAN RIAU	780	80	-	-	860	2,100,000	1,806,000,000
422	LINGGA	200				200	2,100,000	420,000,000
423	NATUNA	200				200	2,100,000	420,000,000
424	BINTAN	120				120	2,100,000	252,000,000
425	ANAMBAS	120				120	2,100,000	252,000,000
426	KARIMUN	140				140	2,100,000	294,000,000
427	KOTA BATAM		80			80	2,100,000	168,000,000
31	PAPUA BARAT	4,620	-	460	-	5,080	2,100,000	10,668,000,000
428	sorong	1,500		160		1,660	2,100,000	3,486,000,000
429	Manokwari	540				540	2,100,000	1,134,000,000
430	Fak-fak	540		160		700	2,100,000	1,470,000,000
431	Kota Sorong	280				280	2,100,000	588,000,000
432	Teluk Bintuni	260				260	2,100,000	546,000,000
433	Teluk Wondama	240				240	2,100,000	504,000,000
434	Kaimana	360				360	2,100,000	756,000,000
435	Sorong Selatan	500		140		640	2,100,000	1,344,000,000

436	maybrat	200				200	2,100,000	420,000,000
437	tambrau	200				200	2,100,000	420,000,000
32	SULAWESI BARAT	1,960	160	-	-	2,120	2,100,000	4,452,000,000
438	Mamuju	200				200	2,100,000	420,000,000
439	Majene	300	160			460	2,100,000	966,000,000
440	Mamasa	440				440	2,100,000	924,000,000
441	Mamuju Utara	460				460	2,100,000	966,000,000
442	Polewali Mandar	560				560	2,100,000	1,176,000,000

Lampiran 2.

Contoh

Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK)
Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan
TA. 2013

Kabupaten/Kota :
Kecamatan :
Desa :
Nama Kelompok Tani :

Jenis Pekerjaan		Satuan	Harga Per Satuan	Volume	Jumlah Biaya (Rp)	Sumber Dana *)
a	Penyediaan Bahan/Material					
	- Pasir	M ³				
	- Batu	M ³				
	- Semen	Zak				
	- Besi	Batang				
	- Bata	Buah				
	- Lain-lain (sebutkan)					
b	Pelaksanaan Fisik	HOK				
	- Pembersihan badan jalan	HOK				
	- Pengerasan badan jalan	HOK				
	- Pembuatan/perbaikan saluran di kanan kiri jalan	HOK				
	- Penanaman rumput pada tebing jalan	HOK				
	- Pembuatan/perbaikan gorong-gorong, jembatan	HOK				
	- Penimbunan dan perataan	HOK				
	- Lain-lain (sebutkan)					
c	Sewa alat	Hari				
d	Pemeliharaan					
	- Lain-lain (sebutkan)					
TOTAL DANA						

Keterangan :

*) Sumber dana berasal dari : Tugas Pembantuan, APBD,
Swadaya petani

....., 2013

Mengetahui
Kepala Dinas Kab/Kota,

Tim Teknis Kab/Kota,

Ketua Kelompok Tani

.....

.....

.....

Lampiran 3.

JADWAL KEGIATAN OPTIMASI LAHAN TA. 2013

JADWAL KEGIATAN PENGEMBANGAN OPTIMASI LAHAN TAHUN 2013

Direktorat Pengelolaan Lahan
Subdit Optimasi Lahan
Seksi Identifikasi dan Analisis

No.	Nama Kegiatan	Bulan																																																	
		Januari				Pebruari				Maret				April				Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				Nopember				Desember					
		Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke	Minggu ke			
I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1	Persiapan																																																		
a	Pembuatan Juklak oleh Propinsi																																																		
b	Pembuatan Juknis oleh Kab/Kota																																																		
c	Koordinasi dengan Instansi terkait																																																		
d	Sosialisasi																																																		
e	Inventarisasi CPCL																																																		
f	Penetapan Lokasi																																																		
g	Musyawarah Kelompok Tani																																																		
h	Pembuatan rekening kelompok																																																		
i	Pembuatan Rancangan Teknis Sederhana																																																		
j	Penyusunan RUKK																																																		
k	Transfer dana																																																		
2	Pelaksanaan																																																		
a	Pelaksanaan fisik																																																		
b	Penyediaan saprodi																																																		
c	Penanaman																																																		
d	Pemeliharaan																																																		
3	Monitoring																																																		
4	Evaluasi																																																		
	- Kabupaten/Kota																																																		
	- Propinsi																																																		

Lampiran 5

LAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN TA. 2013

Form PSP.02

Dinas :
 Propinsi :
 Subsektor :
 Program :
 Bulan :

No.	Dinas Kabupaten/Kota*)	Aspek/Kegiatan	Pagu DIPA		Realisasi Terhadap Pagu DIPA				Keterangan
			Anggaran (Rp)	Fiak (Ha/Km/Unit)	Anggaran (Rp)	(%)	Fiak (Ha/Km/Unit)	(%)	
1	Dinas*) Kab/Kota No. SP DIPA :	A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan							
		1. Pengembangan SRI							
		2. Jalan Pertanian							
		3. UPPD							
		4. Optimalisasi Lahan							
		5. dst							
		B. Pengelolaan Air Irigasi							
		1. JIUT							
		2. JIDES							
		3. Tata Air Mikro (TAM)							
		4. dst							
		C. Alat dan Mesin Pertanian							
		1. Tractor Roda 2							
		2. Tractor Roda 4							
		3. dst							
		D. Pupuk dan Pesticida							
		1. Penguatan KPS							
		2. Skrening Pestisida							
		3. dst							
		E. Pembiayaan							
1. PUAP									
2. dst									
2	Dinas*) Kab/Kota No. SP DIPA :								
JUMLAH		1. Pengembangan SRI							
		2. Jalan Pertanian							
		3. UPPD							
		4. JIUT							
		5. Tractor Roda 2							
		6. dst							

1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP Pusat, paling lambat tanggal 10 setiap bulan
 2. Laporan ke Pusat ke Bag Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jaksel. Fax : 021 7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
 *) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

..... 2013
 Penanggung Jawab kegiatan Propinsi

Lampiran 6

LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN DIREKTORAT JENDERAL PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2013

Form PSP.03

Dinas	:
Kabupaten	:
Provinsi	:
Subsektor	:
NO SP DIPA	:

NO	KEGIATAN	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	MANFAAT
1	Perluasan dan Pengelolaan Lahan			
	1. Pengembangan SRI			
	2. Jalan Pertanian			
	3. UPPD			
	4. Optimasi Lahan			
	5. dst			
2	Pengelolaan Air Irigasi			
	1. JIUT			
	2. dDES			
	3. Tata Air Mikro (TAM)			
	4. dst			
3	Alat dan Mesin Pertanian			
	1. Tractor Roda 2			
	2. Tractor Roda 4			
	3. dst			
4	Pupuk dan Pestisida			
	1. Penguatan KP3			
	2. Skrening Pestisida			
	3. dst			
5	Pembiayaan			
	1. PUAP			
	2. dst			

Catatan :

- Laporan dikirim ke Dinas Prognosis terkait tembusan ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
- Laporan ke Ditjen PSP cc. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kampus Deptan Gedung D Lantai 8, Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jakarta via Fax : 021-7816086 atau E-mail : monevpsp@gmail.com
- Manfaat harus terukur, contoh :
 - Kegiatan JIUT/dDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton
 - Rehab JIUT/JAPROD
Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;
 - Cetak Sawah Seluas 200 Ha
Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton
- *) Coret yang tidak perlu

..... 2013
Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten

LAPORAN MANFAAT
KEGIATAN PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN
TA. 2013

Dinas :
Kabupaten :
Provinsi :
Subsektor :
Tahun :

No.	Kegiatan	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	Manfaat
A.	Aspek Pengelolaan Air			
	1. JIUT			
	2. JIDES			
	3. TAM			
	4. dst			
B.	Aspek Pengelolaan Lahan			
	1. Jalan Pertanian			
	2. Optimasi Lahan			
	3. UPPO			
	4. Pengembangan SRI			
	5. dst			
C.	Aspek Perluasan Areal			
	1 Cetak Sawah			
	2 Perluasan Areal Hortikultura			
	3 Perluasan Areal Perkebunan			
	4 dst			

Catatan :

1. Laporan dikirim ke Dinas Propinsi terkait tembusan ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
2. Laporan ke Ditjen PSP cq. ke Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kanpus Kementerian Pertanian Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan, Jaksel via Fax : 021-7816086 atau E-mail: simonevpta@deptan.go.id
3. Manfaat harus terukur, contoh :
 - a. Kegiatan JIUT/JIDES seluas 500 Ha, menaikan IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak $500 \times 0,5 \times 5 \text{ Ton} = 1.250 \text{ ton}$
 - b. Rehab JUT/JAPROD
Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25; / Kg atau Rp. 25.000; / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. $25.000 \times 1.000 = \text{Rp. } 25.000.000$;
 - c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha
Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar $200 \times 2,5 \text{ ton} \times 1,5 = 750 \text{ ton}$
4. *) coret yang tidak perlu

....., 2013
Penanggungjawab Kegiatan Kabupaten

Lampiran 7

**SKOR PEMBOBOTAN FISIK
KEGIATAN OPTIMASI LAHAN TA. 2013**

KEGIATAN		BOBOT (%)
A.	PERSIAPAN	20
1	SK Tim Teknis	2
2	CPCL	3
3	Rancangan Teknis	4
4	RUKK	4
5	Perjanjian kerjasama dan pembukaan rekening	4
6	Transfer Dana	3
B.	PELAKSANAAN / KONSTRUKSI	80
1	Pelaksanaan fisik	40
2	Penyediaan sarana produksi	20
3	Penanaman	20

Lampiran 8

TA. 2013

Dinas	:
Provinsi	:
Subsektor	:

NO	DINAS KAB/KOTA	ASPEK/KEGIATAN	Target Fisik DIPA	Realisasi Fisik	MANFAAT
1	Dinas**)	A. Perluasan dan Pengelolaan Lahan			
	Kab/Kota	1. Cetak Sawah			
	No SP DIPA :	2. Jalan Pertanian			
		3. UPPO			
		4. Optimasi Lahan			
		5. dst			
		B. Pengelolaan Air Irigasi			
		1. JIUT			
		2. JIDES			
		3. Teta Air Mikro (TAM)			
		4. dst			
		C. Alat dan Mesin Pertanian			
		1. Tractor Roda 2			
		2. Tractor Roda 4			
		3. dst			
		D. Pupuk dan Pestisida			
		1. Penguatan KPS			
		2. Skrining Pestisida			
		3. dst			
		E. Pembiayaan			
		1. PUAP			
		2. dst			
2	Dinas**)				
	Kab/Kota				
	No SP DIPA :				

Catatan :
 1. Laporan dikirim ke Ditjen PSP pada akhir Tahun Anggaran
 2. Laporan ke Ditjen PSP cc. Bagian Evaluasi dan Pelaporan d/a. Kampus Deptan Gedung D Lantai 8 Jl. Harsono RM No. 3 Ragunan Jakarta via Fax : 021-7816888 atau Email : monevpspp@gmail.com
 3. Manfaat harus terukur, contoh :
 a. Kegiatan JIUT/JIDES seluas 500 Ha, menabur IP 50 % dengan produktivitas 5 ton/Ha, sehingga manfaat kegiatan berupa peningkatan produksi sebanyak 500 X 0,5 X 5 Ton = 1.250 ton
 b. Rehab Jalan Pertanian
 Manfaat mengurangi ongkos angkut Rp. 25 / Kg atau Rp. 25.000 / Ton pada areal dengan tingkat produksi 1.000 ton sehingga manfaat kegiatan dapat mengurangi ongkos angkut Rp. 25.000 X 1.000 = Rp. 25.000.000;
 c. Cetak Sawah Seluas 200 Ha
 Menyebabkan perluasan areal tanam seluas 200 Ha dengan produktivitas 2,5 ton/Ha dan IP 150 %, sehingga manfaat kegiatan cetak sawah berupa peningkatan produksi sebesar 200 X 2,5 ton X 1,5 = 750 ton
 4. *) Coret yang tidak perlu
 **) Diisi nama Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan kegiatan PSP.

Lampiran 9

LAPORAN AKHIR KEGIATAN OPTIMASI LAHAN TA. 2013

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Tujuan
- 1.3. Sasaran Lokasi

II. RUANG LINGKUP KEGIATAN

- 2.1. Dukungan Pada Kawasan Komoditi
- 2.2. Komponen Kegiatan

III. LOKASI KEGIATAN

IV. PELAKSANAAN KEGIATAN

- 4.1 . Tahapan Kegiatan
- 4.2 . Realisasi Fisik dan Keuangan

V. PERMASALAHAN DAN PEMECAHAN MASALAH

- 5.1 Permasalahan Yang Dihadapi
- 5.2 Pemecahan Masalah

VI. ANALISIS KINERJA

Input, Output, Outcome, Dampak

VII. MANFAAT KEGIATAN

VIII. PENUTUP

LAMPIRAN

LAMPIRAN 10

Tabel 1. DAFTAR RESIKO

UNIT KERJA : Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
 NAMA PIMPINAN : Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc.
 NIP :
 KEGIATAN : Pengembangan optimasi lahan
 TUJUAN : Peningkatan IP

No	Resiko	Penyebab	Dampak
A Organisasi			
1	Tim Teknis yang dibentuk tanpa tugas dan tanggung jawab secara jelas	Tidak dituangkan secara jelas tugas dan tanggung jawabnya	Hasil pekerjaan kurang optimal
B Kebijakan			
1	RUKK belum dibuat secara terperinci dan terjadi pengembangan harga dalam RUKK	Kurangnya kemampuan menyusun RUKK dan tidak dilakukan penyesuaian mengikuti perubahan pelaksanaan dilapangan	Terjadi peluang penyimpangan administrasi dan keuangan
2	Pencairan Dana Bansos tidak sesuai RUKK dan persetujuan Tim Teknis	Kurang pemahaman dalam pelaksanaan Bansos	Pekerjaan tidak terselesaikan sebagaimana mestinya
3	Pertanggungjawaban Bansos tidak tertib	Tim Teknis/Korlap kurang memahami mekanisme Bansos, tidak dilakukan pembukuan secara benar	Dana yang dicairkan kelompok tani tidak dapat dimonitor
4	Masa pelaksanaan pekerjaan melampaui batas yg ditentukan	Peralatan kerja kurang tersedia, kurang tenaga kerja, hambatan faktor cuaca	Sawah baru tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu
C Sumberdaya Manusia			
1	Kurangnya kemampuan SDM dalam pemahaman prosedur kegiatan	Petugas yang mengikuti pelatihan bukan pelaksana kegiatan	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai standar yang ditetapkan
2	Terbatasnya petugas yang menangani kegiatan Optimasi Lahan	Adanya mutasi pegawai ke tempat lain dan kesulitan mendapat SDM yang sesuai kriteria	Tujuan dan sasaran kegiatan tidak tercapai

LAMPIRAN 11

TABEL 2. DAFTAR PENANGANAN RESIKO

UNIT KERJA : Direktorat Perluasan dan Pengelolaan Lahan
 NAMA PIMPINAN : Ir. Tunggul Iman Panudju, M.Sc.
 NIP :
 KEGIATAN : Pengembangan optimasi lahan
 TUJUAN : Peningkatan IP

D	Prosedur			
1	Juklak dan Juknis yang disusun tidak sesuai dengan kondisi lapangan	Petugas kurang memahami dalam penyusunan Juklak dan Juknis	Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai standar yang ditetapkan	Peningkatan sosialisasi dan pembinaan dalam penyusunan Juklak dan Juknis
2	Rapat koordinasi di Pusat dan Propinsi terlambat dilaksanakan	Terlambat mempersiapkan keahitan	Pelaksanaan kegiatan tidak tepat waktu	Perencanaan pelaksanaan rapat koordinasi
No	Identifikasi Resiko	Penyebab	Dampak	Penanganan Resiko
3	Realisasi fisik tidak sesuai target	Partisipasi petani kurang, petani kurang memahami pedoman yang disosialisasikan	Pelaksanaan kegiatan tidak efisien	Peningkatan kualitas kegiatan melalui pemantauan dan pengendalian dengan pembuatan SOP
4	Pekerjaan tidak selesai tepat waktu	Pelaksana kegiatan tidak menepati jadwal yang ditentukan	Sawah baru tidak dapat dimanfaatkan tepat waktu	Kegiatan dilaksanakan sesuai jadwal palang yang telah ditetapkan
5	Pengeluaran uang tidak termonitor	Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan tidak dibuat	Tidak tertib administrasi pertanggungjawaban	Pencairana dana rekening kelompok melalui mekanisme akun bansos